KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal Anggaran Desa - Komisi V: Semoga Realisasinya Cepat
Tanggal : Kamis, 19 November 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Anggaran Desa

Komisi V: Semoga Realisasinya Cepat

WAKIL Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meningkatkan percepatan realisasi dan penyerapan anggaran. Terutama pada program atau kegiatan yang betul-betul dapat diukur dari segi dampak dan pencapaian kinerja terhadap masyarakat. Lebih spesifik, program penanganan pandemi Covid-19 di pedesaan.

Nurhayati yakin, realisasi anggaran di desa hal itu akan berdampak nyata untuk memberikan stimulus sektor riil bagi masyarakat dalam pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.

"Seperti pengembangan desa wisata, pembangunan jalan kawasan perdesaan, fasilitasi pengembangan dan kerja sama BUMDes yang dapat diukur sejauh mana pencapaian kinerja nyata sebagai stimulus sektor riil," kata Nurhayati saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR dengan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar secara virtual di Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, membangun ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa. "Sehingga, bila ekonomi desa bertumbuh signifikan maka pertumbuhan ekonomi nasional dapat terlihat dengan jelas," ujar Nurhayati.

Namun demikian, politisi F-PPP tersebut memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT atas capaian realisasi program dan anggaran Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020. Yakni, realisasi keuangan per tanggal 17 November 2020 mencapai 78,23 persen dan realisasi fisik per tanggal 17 November 2020 mencapai 84,02 persen.

"Selanjutnya, Komisi V DPR meminta Kemendes PDTT untuk mempercepat peningkatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 untuk mencapai prognosis penyerapan keuangan 96 persen sesuai saran dan masukan dari Komisi V," papar legislator Dapil Jawa Barat XI itu membacakan kesimpulan rapat.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, afirmasi-afirmasi khusus yang diberikan kepada desa tidak bertumpu pada pemanfaatan dana desa. Termasuk, untuk desa mandiri yang masih lemah dari segi pertumbuhan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM). ■ ONI